



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil guna, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

11. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan/sasaran strategis organisasi (Pemerintah Daerah dan SKPD).

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Ruang lingkup IKU meliputi:

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) IKU disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) IKU disusun dengan memperhatikan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 4

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan review dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi melakukan evaluasi atas capaian kinerja IKU setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.

Pada tanggal 20 November 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 20 November 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 60

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 60 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2020

KETENTUAN DALAM PENYUSUNAN IKU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, sehingga pemerintah daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat harus mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien secara konsisten dan berkesinambungan dengan menjamin anggaran tepat sasaran. Artinya bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus memberikan manfaat untuk masyarakat utamanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai apabila pelaksanaan pemerintahan berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Sejak awal perencanaan sarannya harus jelas, indikator/alat ukur dan targetnya juga jelas. Untuk itu, SAKIP perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan IKU. Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Maksud menetapkan IKU adalah dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi (Pemerintah Daerah dan SKPD) sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi/kebijakan organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya IKU ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan/sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan IKU, karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program/kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya IKU di lingkungan Pemerintah Daerah diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan perjanjian kinerja/kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan IKU ini, diharapkan para pimpinan SKPD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Diharapkan IKU ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja instansi/aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	BPS SKDP Terkait	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB 5. Dinas Pertanian dan Pangan 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 7. Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata - rata Lama Sekolah</p>	- BPS - SKDP Terkait	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4. Dinas PU Ciptakarya, Perumahan dan Permukiman 5. Dinas Perhubungan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1,2 Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>AHH : Angka Harapan Hidup</p>	- BPS - SKPD Terkait	Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB 3. Dinas PU Ciptakarya, Perumahan dan Permukiman 4. Dinas Perhubungan
		1,3 Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non-pangan	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$	- BPS - SKPD Terkait	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	BPS SKPD Terkait	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Pertanian 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 5. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 6. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 7. Dinas Lingkungan Hidup 8. Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman 9. Dinas Perhubungan 10. Dinas PU Pengairan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2,1 Meningkatnya PDRB sektor unggulan yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	$\frac{\text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n)} - \text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n-1)}}{\text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n-1)}} \times 100\%$	- BPS - SKPD Terkait	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6. Dinas PU Ciptakarya, Perumahan dan Permukiman 7. Dinas PU Pengairan 8. Dinas Perhubungan
		2,2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(30\% \times \text{IKU}) + (30\% \times \text{IKA}) + (40\% \times \text{IKTL})$ IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKPLHD	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Lingkungan Hidup
		2,3 Bertambahnya nilai investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	$\frac{\text{Nilai Investasi Tahun (n)} - \text{Nilai Investasi Tahun (n-1)}}{\text{Nilai Investasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Data investasi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal RI	Penanggungjawab : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Dinas PU Pengairan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$	- BPS - Rekap data pengangguran - Rekap data angkatan kerja	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3	Mengentaskan Masyarakat dari Kemiskinan		Angka Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Keterangan : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p>	BPS SKPD Terkait	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Satpol PP 6. Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman 7. Dinas Perhubungan 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3,1 Mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$ <p>GR = Koefisien Gini F_{pi} = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i F_{ci} = Frekuensi kumulatif ari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i F_{ci-1} = Frekuensi kumulatif ari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p>	- BPS - SKPD Terkait	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		3,2 Menjamin perlindungan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	$\frac{\text{Jumlah Angka PMKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	- BPS - SKPD Terkait	Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB
		3,3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	IPMas (Indeks Pembangunan Masyarakat)	$IPMas = 3 \sqrt{(\text{Indeks Toleransi} \times \text{Indeks Gotong royong} \times \text{Indeks Rasa Aman}) \times 100}$	Hasil survey Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Satuan Polisi Pamong Praja 4. Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan KB
			IPG (Indeks Pembangunan Gender)	$\frac{IPM_{Perempuan}}{IPM_{Laki-laki}}$	- BPS - SKPD Terkait	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			IDM	$\frac{\text{Rata-rata nilai IDM seluruh desa}}{\text{Jumlah desa}} \times 100 \%$	- BPS - SKPD Terkait	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap layanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan dilakukan minimal satu tahun sekali	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4,1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda 3. Inspektorat 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Indeks RB	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB/Tim	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Opini WTP BPK terhadap LKPD	Nilai Penilaian / Evaluasi BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Evaluasi BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Inspektorat
		4,2 Terciptanya inovasi daerah	Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Hasil Evaluasi Evaluasi Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (<i>Cross Cutting</i>) : 1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda 3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Badan Pendapatan Daerah 6. Sekretariat DPRD

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

1. Dinas Pendidikan

1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan		Indeks Pendidikan	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata - rata Lama Sekolah</p>	- BPS - SKPD Terkait	Dinas Pendidikan
		1,1 Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	<p>Jumlah penduduk usia 7-24 yang bersekolah ----- Jumlah penduduk usia 7-24 tahun</p>	BPS	- Bidang Pendidikan SD - Bidang Pendidikan SMP - Bidang Pendidikan Masyarakat
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	<p>Jumlah penduduk usia 25 tahun ketas x Lama pendidikan yang dijalani ----- Jumlah penduduk usia 25 tahun ketas yang telah menyelesaikan pendidikan/berjasaah</p> <p>Penjelasan : Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan atau jumlah hasil perkalian jumlah penduduk dan lama pendidikan yang ditamatkan/dijalani dibagi jumlah penduduk</p>	BPS	- Bidang Pendidikan SD - Bidang Pendidikan SMP - Bidang Pendidikan Masyarakat

2. Dinas Kesehatan

1	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan		Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>AHH : Angka Harapan Hidup</p>	- BPS - SKPD Terkait	Dinas Kesehatan
---	-------------------------------------------	--	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1,1 Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Usia Harapan Hidup	Rata - rata umur yang mungkin bagi bayi pada suatu periode rujukan	BPS	- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Bidang Pelayanan Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
		1,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
3. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Perumahan dan Permukiman						
1	Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur sosial		Persentase kecukupan luasan RTH publik	Luasan RTH Publik yang dibangun ----- x 100% (RTH publik existing + Rencana 2016-2021)	Data RTH publik	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Perumahan dan Permukiman
		1,1 Meningkatnya infrastruktur penunjang Akses Pendidikan dan Kesehatan	Persentase kecukupan luasan RTH publik	Luasan RTH Publik yang dibangun ----- x 100% (RTH publik existing + Rencana 2016-2021)	Data RTH publik	- Bidang Penataan Ruang
			Peningkatan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditangani	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditangani ----- x 100% Database perumahan dan permukiman kumuh seluruh kabupaten	Data perumahan kumuh	- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Meningkatkan Akses dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi		Persentase panjang jalan kabupaten kondisi baik dengan kecepatan >20 Km	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ----- x 100% Panjang Jalan Seluruh Kaupaten Keterangan : Target panjang jalan kondisi baik per tahun 400 km, sampai dengan tahun 2017 terdapat peningkatan persentase dan pada tahun selanjutnya tidak terdapat peningkatan persentase oleh karena pekerjaan yang dilakukan mengulang pada lokasi yang telah terpelihara pada tahun sebelumnya	Data kondisi jalan kabupaten dalam Km	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Perumahan dan Permukiman

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2,1 Meningkatnya Infrastruktur sebagai Penunjang PDRB Sektor Unggulan	Persentase panjang jalan kabupaten kondisi baik dengan kecepatan >20 Km	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Seluruh Kaupaten}} \times 100\%$ <p><i>Keterangan:</i> Target panjang jalan kondisi baik per tahun 400 km, sampai dengan tahun 2017 terdapat peningkatan persentase dan pada tahun selanjutnya tidak terdapat peningkatan persentase oleh karena pekerjaan yang dilakukan mengulang pada lokasi yang telah terpelihara pada tahun sebelumnya</p>		- Bidang Bina Marga
			Persentase peningkatan jembatan yang berfungsi baik	$\frac{\text{Jumlah Jembatan yang dibangun/dipelihara}}{\text{Data base jembatan seluruh kabupaten}} \times 100\%$	Data jembatan	- Bidang Bina Marga
			Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tataruang yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah advice planning yang diimplementasikan}}{\text{Jumlah advice planning yang diterbitkan}} \times 100\%$	Rekap jumlah Advice Planning	- Bidang Penataan Ruang
			Persentase peningkatan bangunan pelayanan publik dan aparaturnya berfungsi baik	$\frac{\text{Jumlah fasilitas publik yang dibangun/dipelihara}}{\text{(Jumlah Gedung Pelayanan Publik eksisting + Rencana 2016-2021)}} \times 100\%$	Rekap jumlah bangunan pelayanan publik	- Bidang Cipta Karya
4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan						
1	Meningkatkan Ketersediaan Air Baku		Persentase Ketersediaan Air Baku	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan air Baku (air irigasi + air bersih)}}{\text{Jumlah Kebutuhan Air Irigasi dan Air Bersih}} \times 100\%$	- Rekap Data Curah Hujan, Debit Sumber Air - PUDAM	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
	1,1 Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku untuk Irigasi maupun Non Irigasi		Persentase ketersediaan Air Baku	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan air Baku (air irigasi + air bersih)}}{\text{Jumlah Kebutuhan Air Irigasi dan Air Bersih}} \times 100\%$	- Rekap Data Curah Hujan, Debit Sumber Air - PUDAM	- Bidang Pengembangan dan Pembangunan SDA

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1,2 Menjaga Kelangsungan Keberadaan, Daya Dukung, Daya Tampung dan Fungsi Sumber Daya Alam	Persentase daerah bebas bencana akibat daya rusak air	Luas daerah bebas bencana akibat daya rusak air ----- x 100 % Luas wilayah	Rekap data daerah genangan	- Bidang Operasional dan Pemeliharaan
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana						
1	Meningkatnya Perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Angka PMKS / PPKS yang ditangani ----- x 100 % Jumlah PMKS / PPKS Keterangan : 26 Kelompok / Kriteria	- BPS - SKPD Terkait	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB
			IPG (Indeks Pembangunan Gender)	$IPM_{Perempuan}$ ----- $IPM_{Laki-laki}$	- BPS - SKPD Terkait	
			Cakupan KB aktif	Jumlah peserta KB aktif (PA) ----- x 100 % Jumlah pasangan usia subur (PUS)	Data peserta KB	
		1,1 Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	Persentase angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Jumlah angka PMKS/PPKS yang ditangani (prioritas) / mendapat bantuan ----- x 100 % Jumlah PMKS/PPKS yang seharusnya yang ditangani / mendapat bantuan Keterangan : PMKS Prioritas	BPS / Rekap PMKS yang ditangani atau mendapat bantuan	- Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
1,2 Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan gender	Persentase kelompok usaha perempuan mandiri (KUPM)	Jumlah kelompok usaha perempuan mandiri (KUPM) ----- x 100 % Jumlah kelompok usaha perempuan yang mendapat binaan (KUPB)	Data kelompok perempuan yang dibina	- Bidang Pemberdayaan Perempuan		

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1,2 Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	Jumlah angka kekerasan perempuan dan anak serta trafficking yang ditangani taun (n) ----- x 100 % Jumlah angka kekerasan perempuan dan anak serta trafficking yang yg masuk taun (n)	Data kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking dari berbagai sumber	- Bidang Pemberdayaan Perempuan
		1,3 Meningkatnya cakupan kesertaan ber-KB	Cakupan KB aktif	Jumlah peserta KB aktif (PA) ----- x 100 % Jumlah pasangan usia subur (PUS)	Data peserta KB	- Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
		2,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian						
1	Meningkatkan PDRB sektor Industri Pengolahan		Pertumbuhan PDRB ADHB sektor Industri Pengolahan	PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun (n) - PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun (n-1) ----- x 100% PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun (n-1)	Data PDRB Kabupaten Banyuwangi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
		1,1 Meningkatnya pengembangan perindustrian	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun (n) - PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun (n-1) ----- x 100% PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun (n-1)	Data PDRB Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
2	Meningkatkan Investasi industri kecil dan menengah		Persentase pertumbuhan nilai investasi industri kecil dan menengah	Nilai investasi industri kecil dan menengah tahun (n) - Nilai investasi industri kecil dan menengah tahun (n-1) ----- x 100% Nilai investasi industri kecil dan menengah tahun (n-1)	Data Laporan Pendataan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
		2,1 Bertambahnya investasi sektor industri	Jumlah pertambahan nilai realisasi investasi industri kecil dan menengah	Nilai investasi industri kecil dan menengah tahun (n) - Nilai investasi industri kecil dan menengah tahun (n-1)	Data Laporan Pendataan	- Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Industri

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran ----- x 100 % Jumlah angkatan kerja	- BPS - Rekap data pengangguran - Rekap data angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
		3,1	Meningkatnya Kesempatan kerja	Persentase Kesempatan Kerja ----- x 100% Jumlah angkatan kerja	- BPS - Rekap data angkatan kerja	- Bidang Tenaga Kerja
		3,2	Meningkatnya perlindungan dan Kesejahteraan Ketenagakerjaan	Persentase Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan ----- x 100% Jumlah kasus ketenagakerjaan yang ada	- Rekap Data Permasalahan Ketenagakerjaan	- Bidang Hubungan Industrial
4	Menurunkan kesenjangan pendapatan industri kecil dan menengah		Gini rasio pendapatan IKM antar wilayah	Rasio gini dari total pendapatan industri kecil dan menengah antar wilayah kecamatan	Laporan hasil pendataan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
		4,1	Menurunnya kesenjangan pendapatan industri kecil dan menengah	Gini rasio pendapatan IKM antar wilayah	Rasio gini dari total pendapatan industri kecil dan menengah antar wilayah kecamatan	Laporan hasil pendataan
5	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
		5,1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat
7. Dinas Perhubungan						
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan		Persentase kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kondisi sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kondisi sarana dan prasarana ----- x 100% Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas tahun (n)	Data angka kecelakaan pada Polres Banyuwangi	Dinas Perhubungan
		1,1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Transportasi	Hasil Survei Indeks Kepuasan Layanan Transportasi	Dokumen hasil survei

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana tahun (n) ----- x 100% Jumlah sarana dan prasarana yang harus ada	Laporan Kegiatan Tahunan	- Bidang Lalu Lintas
			Persentase panjang jalan terlayani LPJU	Panjang jalan kabupaten terlayani LPJU pada tahun (n) ----- x 100% Total panjang jalan kabupaten tahun (n)	Laporan Kegiatan Tahunan	Bidang Penerangan Jalan dan Perparkiran
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian						
1	Meningkatkan penggunaan sistem informasi daerah		Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang mengimplementasikan IT	Jumlah perangkat daerah dan unit kerja yang mengimplementasikan IT ----- x 100 % Jumlah total perangkat daerah dan unit kerja	Website : banyuwangikab.g o.id	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		1,1 Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Persentase perangkat daerah dan unit kerja yang mengimplementasikan IT	Jumlah perangkat daerah dan unit kerja yang mengimplementasikan IT ----- x 100 % Jumlah total perangkat daerah dan unit kerja	Website : banyuwangikab.g o.id	- Bidang Teknologi Informasi
			Persentase Informasi Publik yang terpublikasi	Jumlah informasi publik yang terpublikasi d ----- x 100 % Jumlah informasi publik yang tersedia	Informasi publik yang termuat di media massa lokal dan nasional	- Bidang informatika, dan Komunikasi Publik
		1,2 Meningkatnya kinerja sistem persandian daerah	Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara	Jumlah pengamanan informasi yang terselenggara ----- x 100 % Jumlah total pengamanan informasi yang harus dilakukan	Data pengamanan persandian	- Bidang Statistik dan Persandian
		1,3 Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun	Jumlah informasi statistik yang tersusun ----- x 100 % Jumlah informasi statistik yang tersedia	BPS dan Survei Masyarakat	- Bidang statistik dan persandian
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
1	Meningkatkan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		Pertumbuhan PDRB ADHB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	PDRB ADHK sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun (n) - PDRB ADHK sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun (n-1) ----- x 100% PDRB ADHKsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun (n-1)	Data PDRB Kabupaten Banyuwangi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1,1 Meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan tahun (n) - Jumlah kunjungan wisatawan tahun (n-1) ----- x 100% Jumlah kunjungan wisatawan tahun (n)	Rekap kunjungan wisatawan	- Bidang Produk Pariwisata - Bidang Pemasaran - Bidang Kebudayaan
			Persentase peningkatan length of stay wisatawan	Jumlah length of stay wisatawan tahun (n) - Jumlah length of stay wisatawan tahun (n-1) ----- x 100% Jumlah length of stay wisatawan tahun (n)	Hasil survey lama	- Bidang Produk Pariwisata - Bidang Pemasaran - Bidang Kebudayaan
			Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Data pengembangan budaya lokal	Bidang Kebudayaan
10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan						
1	Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap komoditas perdagangan		Indeks harga konsumen	Nilai Indeks Harga Konsumen Umum	- BPS	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
		1,1 Meningkatnya daya beli masyarakat melalui stabilitasi harga komoditas perdagangan	Indeks harga konsumen makanan dan minuman	Nilai Indeks Harga Konsumen sektor makanan, minuman dan tembakau	- BPS	Bidang Perdagangan
2	Meningkatkan PDRB sektor Perdagangan		Pertumbuhan PDRB ADHB sektor Perdagangan	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun (n) - PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun (n-1) ----- x 100% PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun (n-1)	- BPS diolah SKPD	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
		2,1 Meningkatnya pengembangan koperasi, usaha mikro dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun (n) - PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun (n-1) ----- x 100% PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun (n-1)	- BPS diolah SKPD	Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar
			Persentase UKM terhadap UMKM	Jumlah UKM non pertanian tahun (n) ----- x 100 % Jumlah UMKM non pertanian di tahun (n)	- BPS - Laporan hasil pendataan	- Bidang Usaha Mikro

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase koperasi berkualitas	Jumlah koperasi yang berkualitas tahun (n) ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi tahun (n)	Laporan penilaian KSP/USP sehat dan data keragaan koperasi	- Bidang Koperasi
3	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro		Persentase kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro	Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil ----- x 100% Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	- BPS diolah SKPI	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
		3,1 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro	Persentase kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro	Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil ----- x 100% Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	- BPS diolah SKPI	- Bidang Usaha Mikro
4	Menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan sektor usaha mikro dan perdagangan		Gini rasio pendapatan UMKM antar wilayah kecamatan	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_i - 1]$ fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Yi = jumlah kuantitatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya Bila GR = 1, ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau kelompok saja	Laporan hasil pendataan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
		4,1 Menurunnya kesenjangan tingkat pendapatan sektor usaha mikro dan perdagangan	Gini rasio pendapatan UMKM antar wilayah kecamatan	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_i - 1]$ fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Yi = jumlah kuantitatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya Bila GR = 1, ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau kelompok saja	Laporan hasil pendataan	- Bidang Usaha Mikro

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Gini rasio pendapatan pedagang antar pasar	Rasio gini total pendapatan pedagang antar pasar daerah tahun (n)	Laporan hasil pendataan	- Bidang Pasar
11. Dinas Pertanian dan Pangan						
1	Meningkatkan ketersediaan bahan pangan pokok		Persentase ketersediaan bahan pangan pokok	$\frac{\text{Produksi bahan pangan pokok tahun (n)}}{\text{Kebutuhan bahan pangan pokok tahun (n)}} \times 100 \%$ <p>Bahan pangan pokok Keterangan : Bahan Pangan Pokok (12 item) = Beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng.</p>	- SKPD Terkait	Dinas Pertanian dan Pangan
		1,1 Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pokok Unggulan	Persentase ketersediaan bahan pangan pokok unggulan	$\frac{\text{Produksi bahan pangan pokok unggulan tahun (n)}}{\text{Kebutuhan bahan pangan pokok unggulan tahun (n)}} \times 100 \%$ <p>'Bahan pangan pokok unggulan Keterangan : Bahan Pangan Pokok unggulan (6 item) = beras, bawang merah, cabe besar, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras</p>	- SKPD Terkait	Bidang Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya PDRB di sektor pertanian unggulan		Prosentase pertumbuhan sektor pertanian unggulan dalam PDRB	$\frac{\text{PDRB sektor Pertanian Unggulan th. (n)} - \text{PDRB sektor Pertanian Unggulan th. (n-1)}}{\text{PDRB sektor Pertanian Unggulan th. (n-1)}} \times 100\%$ <p>PDRB sektor pertanian = PDRB sub sektor tanaman pangan (ADHK) + PDRB sub sektor hortikultura (ADHK) + PDRB sub sektor perkebunan (ADHK) + PDRB sub sektor peternakan (ADHK)</p> <p>ADHK = Atas Dasar Harga Konstan</p>	- BPS - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Tanaman Pangan - Bidang Perkebunan dan Hortikultura - Bidang Budidaya dan Usaha Peternakan - Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Bidang Ketahanan Pangan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2,1 Meningkatnya kemampuan sektor pertanian unggulan dalam mendukung peningkatan PDRB	Prosentase peningkatan Produktivitas Padi	$\frac{\text{Produktivitas padi tahun (n)} - \text{Produktivitas padi tahun (n - 1)}}{\text{Produktivitas padi tahun (n - 1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Tanaman Pangan
			Prosentase Peningkatan Produktivitas Jagung	$\frac{\text{Produktivitas jagung tahun (n)} - \text{Produktivitas jagung tahun (n - 1)}}{\text{Produktivitas jagung tahun n - 1}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Tanaman Pangan
			Prosentase Peningkatan Produktivitas Kedelai	$\frac{\text{Produktivitas kedelai tahun (n)} - \text{Produktivitas kedelai tahun (n - 1)}}{\text{Produktivitas kedelai tahun n - 1}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Tanaman Pangan
			Prosentase Peningkatan Produktivitas kopi	$\frac{\text{Produktivitas kopi tahun (n)} - \text{Produktivitas kopi tahun (n - 1)}}{\text{Produktivitas kopi tahun n - 1}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produktivitas kakao	$\frac{\text{Produktivitas kakao tahun (n)} - \text{Produktivitas kakao tahun (n - 1)}}{\text{Produktivitas kakao tahun n - 1}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produktivitas tembakau	$\frac{\text{Produktivitas tembakau tahun (n)} - \text{Produktivitas tembakau tahun (n - 1)}}{\text{Produktivitas tembakau tahun (n - 1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produktivitas kelapa	$\frac{\text{Produktivitas kelapa tahun (n)} - \text{Produktivitas kelapa tahun (n - 1)}}{\text{Produktivitas kelapa tahun (n - 1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produktivitas cabe merah	$\frac{\text{Produktivitas cabe merah tahun (n)} - \text{Produktivitas cabe merah tahun (n - 1)}}{\text{Produktivitas cabe merah tahun (n - 1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Prosentase Peningkatan Produktivitas cabe rawit	$\frac{\text{Produktivitas cabe rawit tahun (n)} - \text{Produktivitas cabe rawit tahun (n-1)}}{\text{Produktivitas cabe rawit tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produktivitas bawang merah	$\frac{\text{Produktivitas bawang merah tahun (n)} - \text{Produktivitas bawang merah tahun (n-1)}}{\text{Produktivitas bawang merah tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produktivitas jeruk	$\frac{\text{Produktivitas jeruk tahun (n)} - \text{Produktivitas jeruk tahun (n-1)}}{\text{Produktivitas jeruk tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produktivitas buah naga	$\frac{\text{Produktivitas buah naga tahun (n)} - \text{Produktivitas buah naga tahun (n-1)}}{\text{Produktivitas buah naga tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produktivitas durian	$\frac{\text{Produktivitas durian tahun (n)} - \text{Produktivitas durian tahun (n-1)}}{\text{Produktivitas durian tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produktivitas manggis	$\frac{\text{Produktivitas manggis tahun (n)} - \text{Produktivitas manggis tahun (n-1)}}{\text{Produktivitas manggis tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produktivitas melon	$\frac{\text{Produktivitas melon tahun (n)} - \text{Produktivitas melon tahun (n-1)}}{\text{Produktivitas melon tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produktivitas semangka	$\frac{\text{Produktivitas semangka tahun (n)} - \text{Produktivitas semangka tahun (n-1)}}{\text{Produktivitas semangka tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produktivitas pisang	$\frac{\text{Produktivitas pisang tahun (n)} - \text{Produktivitas pisang tahun (n-1)}}{\text{Produktivitas pisang tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Prosentase Peningkatan Produktivitas jahe	$\frac{\text{Produktivitas jahe tahun (n)} - \text{Produktivitas jahe tahun (n-1)}}{\text{Produktivitas jahe tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Perkebunan dan Hortikultura
			Prosentase Peningkatan Produksi daging	$\frac{\text{Produksi daging tahun n} - \text{Produksi daging tahun (n-1)}}{\text{Produksi daging tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Budidaya dan Usaha Ternak - Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Prosentase Peningkatan Produksi susu	$\frac{\text{Produksi susu tahun (n)} - \text{Produksi susu tahun (n-1)}}{\text{Produksi susu tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Budidaya dan Usaha Ternak - Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Prosentase Peningkatan Produksi telur	$\frac{\text{Produksi telur tahun (n)} - \text{Produksi telur tahun (n-1)}}{\text{Produksi telur tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Budidaya dan Usaha Ternak - Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
12. Dinas Perikanan						
1	Meningkatkan PDRB Subsektor Perikanan		Pertumbuhan PDRB Subsektor perikanan	$\frac{\text{PDRB Subsektor perikanan Tahun (n)} - \text{PDRB Subsektor perikanan (n-1)}}{\text{PDRB Subsektor perikanan (n-1)}} \times 100\%$	- BPS - SKPD Terkait	Dinas Perikanan
		1,1 Meningkatnya PDRB Subsektor Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	$\frac{\text{Realisasi produksi tahun (n)} - \text{Realisasi produksi tahun (n-1)}}{\text{Realisasi produksi tahun (n-1)}} \times 100\%$	- BPS - SKPD Terkait	- Bidang Perikanan Tangkap - Bidang Perikanan Budidaya
			Persentase peningkatan nilai produksi perikanan	$\frac{\text{Realisasi nilai produksi tahun n} - \text{Realisasi nilai produksi tahun (n-1)}}{\text{Realisasi nilai produksi tahun (n-1)}} \times 100\%$	- BPS - SKPD Terkait	- Bidang Perikanan Tangkap - Bidang Perikanan Budidaya
			Persentase peningkatan kelas kelompok	$\frac{\text{Jumlah KNK di tahun (n)}}{\text{Jumlah kelompok keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Ket: KNK = kelompok naik kelas</p>	- BPS - SKPD Terkait	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan persentase desa mandiri		Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri tahun (n) - ----- x 100% Jumlah Total Desa	- BPS - SKPD Terkait	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1,1 Meningkatnya partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Jumlah Skor IKE seluruh Desa ----- Jumlah Total Desa	- Dokumen lembaga ekonomi desa yang baik/berdaya - SKPD Terkait	- Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa
			Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Jumlah Skor IKS seluruh Desa ----- Jumlah Total Desa	- Dokumen lembaga kemasyarakatan Desa yang Aktif - SKPD Terkait	- Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan Desa	Jumlah Total nilai Survei IKM seluruh Desa ----- Jumlah Total Desa	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2,1 Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Desa	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan Desa	Jumlah Total nilai Survei IKM seluruh Desa ----- Jumlah Total Desa	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa - Sekretariat
14. Dinas Lingkungan Hidup						
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$ IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKPLHD	Dinas Lingkungan Hidup
		1,1 Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$100 - [(84.3 - (\text{Lahan} / \text{Luas Wilayah} \times 100)) \times (50 / 54.3)]$	IKPLHD	- Bidang Pengawasan dan Pengendalian - Bidang Konservasi dan Rehabilitasi
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	$100 - [(50/0.9) \times (\text{tot IEU} / 2 - 0.1)]$	IKPLHD	- Bidang Pengawasan dan Pengendalian - Bidang Konservasi dan Rehabilitasi
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Total Nilai = Koefisien x persen	IKPLHD	- Bidang Pengawasan dan Pengendalian - Bidang Konservasi dan Rehabilitasi - Bidang Kebersihan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Rasio sampah yang tertangani	$\frac{\text{volume sampah yang tertangani (ton/th)}}{\text{voleh sampah (ton)}} \times 100\%$	IKPLHD	- Bidang Kebersihan
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
1	Meningkatkan Investasi yang dapat menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Nilai Investasi	$\frac{\text{Nilai Investasi Tahun (n)} - \text{Nilai Investasi Tahun (n-1)}}{\text{Nilai Investasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Data investasi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal RI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1,1 Meningkatnya nilai realisasi Realisasi Investasi di Daerah	Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN dalam satu tahun Anggaran	Laporan Data Rekapitulasi	- Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan - Sekretariat
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga						

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan kepemudaan		Persentase pemuda berwirausaha	<p>Jumlah pemuda yang dilatih menjadi wirausaha ----- x 100</p> <p>Jumlah pemuda yang dilatih</p> <p>Ket : Pemuda Wirausaha = Pemuda yang mampu menerapkan hasil dari pelatihannya, bisa menciptakan inovasi dari sebuah karya, dan mampu mengembangkan diri lebih baik lagi serta mampu menerapkan dalam kehidupannya dengan semangat kerja yang tinggi sehingga tingkat kemandirian dalam usaha meningkatkan ekonomi semakin baik</p> <p>Pemuda dilatih = Target pemuda yang dilatih mengikuti pelatihan (dalam tahun berjalan)</p>	Laporan kegiatan Bid.Pemuda	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		1,1 Meningkatnya potensi sumber daya kepemudaan melalui pembinaan yang intensif	Persentase pemuda terampil	<p>Jumlah Pemuda Terampil ----- x 100%</p> <p>Jumlah Keseluruhan Pemuda</p> <p>Ket : Pemuda Terampil = Target pemuda yang cakap dalam menerapkan hasil pelatihan (dalam tahun berjalan)</p> <p>Pemuda dilatih = Target pemuda yang dilatih mengikuti pelatihan (dalam tahun berjalan)</p>	Laporan kegiatan Bid.Pemuda	- Bidang Pemuda
			Persentase pemuda pelopor	<p>Jumlah Pemuda pelopor ----- x 100%</p> <p>Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan</p> <p>Ket : Pemuda Pelopor = Pemuda bisa menciptakan sesuatu / inovasi dan atau mengubah gagasan menjadi sebuah karya nyata yang diikuti oleh masyarakat luas sehingga mampu berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat</p>	Laporan kegiatan Bid.Pemuda	- Bidang Pemuda

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan kualitas dan akses keolahragaan		Persentase atlet berprestasi	<p>Jumlah atlet yang berprestasi ----- x 100</p> <p>Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan</p> <p>Ket : Atlet berprestasi = Atlet yang memiliki minat dan bakat tersendiri dalam cabang olahraga yang mengikuti perlombaan atau pertandingan dalam kejuaraan</p>	Laporan kegiatan Bid.Olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		2,1 Meningkatnya prestasi olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga	Persentase atlet yang mengikuti kompetisi luar daerah	<p>Jumlah atlet yang mengikuti kompetisi ----- x 100</p> <p>Jumlah atlet keseluruhan</p> <p>Ket : Atlit yang mengikuti kompetisi = Atlit yang memiliki kejuaraan luar daerah (dalam tahun berjalan)</p> <p>Keseluruhan atlet = atlet yang mengikuti TC (dalam tahun berjalan)</p>	Laporan kegiatan Bid.Olahraga	- Bidang Olahraga
3	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
		3,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
1	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat serta Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Arsip		Persentase peningkatan minat baca	<p>Jumlah pengunjung perpustakaan tahun (n) - Jumlah pengunjung perpustakaan tahun (n-1) ----- x 100%</p> <p>Jumlah pengunjung perpustakaan tahun (n-1)</p>	Laporan bulanan peminjam dan pengunjung perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase peningkatan arsip statis dan dinamis yang dikelola	<p>Jumlah arsip statis dan dinamis yang dikelola tahun (n) - Jumlah arsip statis dan dinamis yang dikelola tahun (n-1) ----- x 100 %</p> <p>Jumlah arsip statis dan dinamis yang dikelola tahun (n-1)</p>	Rekap laporan bulanan dokumen arsip yang masuk di Depo Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
		1,1	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase minat baca	Jumlah pengunjung perpustakaan ----- x 100 % Jumlah penduduk usia baca	Laporan bulanan peminjam dan pengunjung perpustakaan	- Bidang Perpustakaan
		1,2	Meningkatnya penataan dan pengelolaan arsip	Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola	Jumlah data dan dokumen arsip yang dikelola dengan baik ----- x 100 % Jumlah data dan dokumen arsip yang ada	Rekap laporan bulanan dokumen arsip yang masuk di Depo Arsip	- Bidang Kearsipan
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat	
		2,1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Cakupan Administrasi Kependudukan		Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update	Jumlah Penduduk Hasil Konsolidasi ----- x 100 Jumlah Penduduk yang ada di Database Kependudukan	Dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		1,1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Peristiwa Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP-el	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP- el ----- x 100 Jumlah Wajib KTP - el	Dokumen Pendaftaran Penduduk	- Bidang Pendaftaran Penduduk - Bidang Inovasi dan Pemanfaatan Data - Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		1,2	Meningkatnya Kualitas Pencatatan Sipil Peristiwa Penting	Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Persentase jumlah dokumen Akta Pencatatan Sipil ----- x 100 Jumlah Jenis Produk Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Dokumen Pencatatan Sipil	- Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil - Bidang Inovasi dan Pemanfaatan Data - Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Sekretariat	

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Sekretariat
19. Satuan Polisi Pamong Praja						
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Indeks Rasa Aman	Hasil indeks rasa aman dalam survei indeks pembangunan masyarakat	Hasil survey Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Satuan Polisi Pamong Praja
		1,1 Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Rasa Aman	Hasil indeks rasa aman dalam survei indeks pembangunan masyarakat	Hasil survey Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat - Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah - Bidang Perlindungan Masyarakat(LINMAS) - Bidang Penanggulangan Kebakaran
			Persentase Penurunan pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran tahun (n-1) - Jumlah pelanggaran Perda tahun (n) ----- x 100% Jumlah pelanggaran tahun (n)	Data pelanggaran perda	- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat - Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah - Bidang Perlindungan Masyarakat(LINMAS) - Bidang Penanggulangan Kebakaran
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
		2,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat	Rata-rata persentase kualitas dokumen perencanaan (memuat visi, misi, tujuan, program, indikator, kinerja utama dan target kinerja yang mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik.	Dokumen perencanaan (RKPD, RPJMD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1,1 Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	Rata-rata persentase kualitas dokumen perencanaan (memuat visi, misi, tujuan, program, indikator, kinerja utama dan target kinerja yang mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik	Dokumen RKPD	- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
		1,2 Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang tercapai targetnya ----- x 100 % Jumlah SKPD	Laporan Monev SKPD	- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
2	Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas		Tersedianya informasi dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang memenuhi aspek kualitas	Jumlah policy brief bidang perencanaan pembangunan sektoral yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan ----- x 100% Jumlah policy brief bidang perencanaan pembangunan	Policy Brief kajian bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2,1 Terpenuhinya Persentase policy brief bidang perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan	Persentase policy brief bidang perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan	Jumlah policy brief bidang perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan ----- x 100 % Jumlah policy brief bidang perencanaan pembangunan	Policy Brief kajian bidang perencanaan pembangunan	- Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan LH - Bidang Ekonomi - Bidang Kesra dan Pemerintahan
		2,2 Terpenuhinya Persentase policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan	Persentase policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan	Jumlah policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan ----- x 100 % Jumlah policy brief bidang perencanaan pembangunan	Policy Brief kajian bidang penelitian dan pengembangan	- Bidang Penelitian dan Pengembangan
3	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparat	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		3,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
1	Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah		Opini BPK terhadap LKPD	Nilai Penilaian / Evaluasi BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. efektivitas sistem pengendalian internal	Hasil Evaluasi BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		1,1 Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase anggaran yang pembebanan rekening belanjanya tidak sesuai ketentuan	Jumlah anggaran yang pembebanan rekening belanjanya tidak sesuai ketentuan ----- x 100 Jumlah APBD	DPA dan DPPA SKPD	- Bidang Anggaran
			Persentase penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas	Jumlah Pengajuan SPM SKPD ----- x 100% Jumlah SP2D yang terbit	Penerbitan SP2D	- Bidang Pengelolaan Keuangan
			Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah Dokumen LKPD yang sesuai SAP dan tepat waktu ----- x 100 % Jumlah Dokumen LKPD yang disusun	Permendagri 13 tahun 2006	- Bidang Akuntansi
		1,2 Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Penggunaan dan pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang digunakan dan dimanfaatkan Tahun Berkenaan ----- x 100 % Jumlah BMD sesuai LBMD Unaudited Tahun Berkenaan	LBMD Anaudit tahun berkenaan dan SK Barang Pengguna	- Bidang Aset
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Sekretariat
		2,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Sekretariat
22. Badan Pendapatan Daerah						
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	(Realisasi PAD tahun n) - (Realisasi PAD tahun n - 1) ----- x 100 % Realisasi PAD tahun n - 1	Laporan Realisasi PAD	Badan Pendapatan Daerah

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1,1 Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PAD ----- x 100 % Target PAD	Laporan Realisasi PAD	- Bidang Pendataan dan Validasi - Bidang Penagihan dan Pemeriksaan
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
		2,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat - Bidang Bidang Pendataan dan Validasi
23. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
1	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur		Indeks Profesionalisme ASN	Hasil penilaian profesionalisme ASN	Dokumen hasil penilaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		1,1 Meningkatnya Kualitas ASN Daerah	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur di Kabupaten Banyuwangi	Jumlah SDM Aparatur yang telah mengikuti dan tugas belajar ----- x 100 % Jumlah SDM Aparatur	Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat	- Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai
			Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai komeptensi ----- x 100 % Jumlah total pegawai	Laporan penempatan pegawai	- Bidang Pengadaan, Mutasi dan Data Pegawai
			Persentase Pegawai yang berkinerja baik	Jumlah pegawai yang berkinerja baik ----- x 100 % Jumlah total pegawai	Dokumen hasil penilaian	- Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Pelayanan	Hasil survei tingkat kepuasan pelayanan ASN	Dokumen hasil survei	- Sekretariat
		2,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Hasil survei tingkat kepuasan pelayanan ASN	Dokumen hasil survei	- Sekretariat
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
1	Menurunkan Resiko Bencana		Indeks Resiko Bencana	Hasil indeks dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1,1 Meningkatnya Kemampuan masyarakat tentang kebencanaan	Indeks mitigasi resiko sosial	Hasil Indeks mitigasi resiko sosia dalam survei indeks pembangunan masyarakat	Hasil survey Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Bidang Kedaruratan dan Logistik - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
		2,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Indeks Toleransi	Hasil indeks Toleransi dalam survei indeks pembangunan masyarakat	Hasil survey Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1,1 Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan	Tingkat konflik SARA di masyarakat	$\frac{\text{Jumlah konflik sara di masyarakat}}{\text{Jumlah konflik yang ada dimasyarakat}} \times 100 \%$	Laporan FKUB / FPK setiap tahun	- Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan
			Tingkat konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM	$\frac{\text{Jumlah konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM}}{\text{Jumlah konflik yang ada dimasyarakat}} \times 100 \%$	Laporan Kominda tiap tahun	- Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik
		1,2 Meningkatnya peranserta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah daftar pemilik tetap (DPT)}} \times 100 \%$	Laporan hasil Pemilu	- Bidang Budaya Politik dan HAM
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
		2,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
26. Sekretariat Daerah						

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Nilai LPPD	Hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri/Tim	Dok. Hasil penilaian	- Sekretariat Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey pelayanan publik pada SKPD secara Internal / Eksternal	Dok. Hasil survey	- Sekretariat Daerah
		1,1 Meningkatkan Pembinaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah Yang Berkualitas	Jumlah produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum ----- x 100% Jumlah usulan produk hukum daerah	Rekapitulasi produk hukum daerah	- Bagian Hukum
			Persentase Permasalahan Hukum Yang Ditangani Dan Diselesaikan	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani dapat diselesaikan ----- x 100 % Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	Rekapitulasi permasalahan hukum	- Bagian Hukum
			Peringkat LPPD	Hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri/Tim	Dok. Hasil penilaian	- Bagian Pemerintahan
			Persentase Implementasi Regulasi Pemerintahan Desa	Jumlah implementasi regulasi pemerintahan desa ----- x 100 % Jumlah regulasi pemerintahan desa	Data Regulasi Pemerintahan desa	- Bagian Pemerintahan Desa
			Persentase Policy Brief Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Dimanfaatkan	Jumlah Policy Brief yang dimanfaatkan Bupati di bidang Kesejahteraan Masyarakat ----- x 100 % Jumlah policy brief di bidang kesejahteraan masyarakat yang ada	Dok. Policy Brief Bidang Kesejahteraan Masyarakat	- Bagian Kesejahteraan Masyarakat
1,2 Meningkatkan Pembinaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Policy Brief Bidang Perekonomian Yang Dimanfaatkan	Jumlah Policy Brief yang dimanfaatkan Bupati di bidang Perekonomian ----- x 100 % Jumlah policy brief di bidang perekonomian yang ada	Dok. Policy Brief Bidang Perekonomian	- Bagian Perekonomian		
	Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang Efisien	Jumlah pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien ----- x 100 % Jumlah pengadaan barang dan jasa	Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
	1,3 Meningkatkan Pembinaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas ----- x 100 % Jumlah dokumen perencanaan dan kinerja Sekretariat Daerah	Dok. Renstra, Renja, PK, Penilaian Kinerja	- Bagian Perencanaan dan Keuangan Bagian Umum	

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Bidang Administrasi Umum, Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH	Jumlah pelayanan KDH/WKDH pada tahun n yang disediakan ----- x 100 % Jumlah pelayanan KDH/WKDH pada tahun n yang diminta	Rekapitulasi Pelayanan KDH WKDH	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bagian Umum
			Persentase Tertib Pengelolaan Barang/Aset Daerah Di lingkungan Sekretariat Daerah	Jumlah barang aset daerah di lingkungan Sekretariat Daerah yang dikelola dengan tertib ----- x 100 % Jumlah barang aset daerah di lingkungan Sekretariat Daerah	Laporan Pengelolaan Barang/Aset Sekretariat Daerah	- Bagian Umum
			Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian PMPRB / Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB	Dok. Hasil PMPRB / Hasil Evaluasi KemenPAN-RB	- Bagian Organisasi
			Nilai/Predikat AKIP (A)	Hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB	Dok. Hasil evaluasi	- Bagian Organisasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey pelayanan publik pada SKPD secara Internal / Eksternal	Dok. Hasil survey	- Bagian Organisasi
			Jumlah Inovasi Lolos Penilaian Nasional	Hasil Penilaian Nasional Inovasi	Dok. Hasil penilaian	- Bagian Organisasi
			Persentase peningkatan kinerja kedinasan KDH/WKDH	Jumlah kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang memenuhi aspek kualitas ----- x 100 % Jumlah kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang dilaksanakan X 100%	Rekapitulasi Kegiatan Kedinasan KDH/WKDH	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bagian Umum
27. Sekretariat DPRD						
1	Meningkatkan produk legislasi yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas DPRD dan dukungan layanan Sekretariat DPRD		Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda ----- x 100 % Jumlah Raperda dalam propemperda	Rekap jumlah perda yang sahkan	Sekretariat DPRD
			Persentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti -----x 100 % Jumlah Pengaduan Masuarakat	Rekap Jumlah Pengaduan Masyarakat	Sekretariat DPRD
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang Baik	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Sekretariat DPRD

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1,1 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda ----- x 100 % Jumlah Raperda dalam propemperda	Rekap jumlah perda yang sahkan	- Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		1,2 Meningkatnya layanan fasilitas keluhan / pengaduan masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti -----x 100 % Jumlah Pengaduan Masuarakat	Rekap Jumlah Pengaduan Masyarakat	- Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		1,3 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Bagian Umum - Bagian Perencanaan & Keuangan
28. Inspektorat						
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah		Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Inspektorat
			Indeks RB	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB/Tim	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat
1,1		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK terhadap LKPD (WTP)	Hasil penilaian / evaluasi BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah	Nilai evaluasi BPK	- Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV
			Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03	Penurunan jumlah temuan berulang kode 01, 02 dan 03 tahun (n) - Penurunan jumlah temuan berulang kode 01, 02 dan 03 tahun (n-1) ----- x 100 % Penurunan jumlah temuan berulang kode 01, 02 dan 03 tahun (n-1)	Laporan rekap PKPT semesteran	- Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV
			Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan negara/daerah dan Administrasi	Jumlah rekom temuan keuangan yang selesai ditindaklanjuti ----- x 100 % Jumlah seluruh rekom temuan keuangan	Laporan rekap PKPT semesteran	- Inspektur Pembantu Wilayah IV dan Sekretaris

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal A	Jumlah SKPD dengan nilai evaluasi SAKIP minimal A ----- x 100 % Jumlah SKPD yang dievaluasi	Laporan hasil evaluasi	- Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III
			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) PMPRB	Hasil Penilaian PMPRB / Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB	Lembar Kerja Evaluasi (LHE) RB dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) RB	- Inspektur Pembantu Wilayah IV dan Sekretaris
			Peningkatan level Kapasitas APIP	Hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB	Laporan Hasil Quality Assurance (QA) oleh Perwakilan BPKP Prop Jatim	- Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV, dan Sekretaris
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
		2,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
29. Kecamatan						
1	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Kecamatan
		1,1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat - Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan - Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS